BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari BAB sebelumnya yang telah dilakukan penulis atas Prosedur Penyusunan Anggaran Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Penyusunan Anggaran Program Sarana dan Prasarana Aparatur pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung sebagai berikut : Identifikasi kebutuhan lingkup dinas tentang sarana dan prasarana aparatur, susun skala prioritas berdasarkan urgensinya, cek pagu anggaran indikatif sesuai yang tertera dalam RENJA (Rencana Kerja) SKPD pertahun, menyusun RUP (Rencana Umum Pengadaan), menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran) berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan dan pagu anggaran, pengesahan RKA, Penyusunan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), membuat SPD (Surat Penyediaan Dana) dari bagian anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung.
2. Hambatan dalam penyusunan anggaran program sarana dan prasarana aparatur yaitu: kurang akuratnya mengidentifikasi kebutuhan barang atau

jasa, belum akurat dalam penyusunan belanja dukung, seperti tenaga ahli, panitia pengadaan barang dan jasa, serta Bantek (bantuan teknis) untuk pekerjaan konstruksi, serta kurang akurat dalam pembuatan indikator kegiatan yang tidak selalu selaras dengan indikator sasaran.

3. Upaya yang telah dilakukan perusahaan untuk mangatasi hambatan yang sewaktu-waktu bisa terjadi maka diperlukan identifikasi kebutuhan secara akurat, memasukkan anggaran untuk tim pendukung pengadaan seperti : Tenaga Ahli, Pengadaan Barang Dan Jasa, Dan Tenaga Bantuan Teknis.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil tinjauan yang lakukan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung ada saran yang sekiranya dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dimasa yang akan datang. Adapun saran yang diberikan penulis, yaitu :

1. Prosedur penyusunan anggaran yang telah dilakukan sudah baik, sehingga instansi terkait bisa mempertahankannya.
2. Untuk meminimalisir hambatan, kinerja instansi terkait melakukan evaluasi agar diperiode selanjutnya tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penyusunan anggaran, dengan cara memaksimalkan penyusunan anggaran melalui komitmen yang tinggi atas pengelolaan keuangan negara. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk keseriusan dan konsistensi mengelola keuangan negara yang berlandaskan pada asas-

asas umum sebagai penerapan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.

3. Dibutuhkan penetapan indikator kegiatan yang lebih baik melalui pengumpulan data kinerja yang dilakukan pada akhir tahun. Pengumpulan data ini untuk menilai keberhasilan organisasi dalam melaksanakan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dijabarkan melalui kebijaksanaan, program operasional dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Kemudian semua fakta-fakta yang terdapat pada pengumpulan data kinerja dicatat ke dalam draf LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang masih berupa rancangan. Kemudian ditahap ini juga menguraikan kegagalan-kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakan serta penyebabnya. apakah kegagalan tersebut disebabkan oleh proses input atau karena keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh instansi. Untuk itu tahapan ini sangat penting dilakukan, karena bisa dijadikan sebagai umpan balik bagi instansi agar kedepannya tidak melakukan kesalahan serupa.